

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Zulia Hanum,SE,MSi

Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619 Vol 10 No2 April 2011

ABSTRAK

Pada prinsip anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu. Dalam Peraturan Mendagri No.13 tahun 2006, APBD didefinisikan sebagai suatu rencana keuangan tahun daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun (tahun 2007-2009). Tetapi pendapatan tersebut lebih banyak diperoleh dari dana perimbangan artinya pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai masih ketergantungan pada pemerintahan pusat. Terjadi peningkatan belanja daerah dari tahun- ketahun (tahun 2007-2009). Tetapi besarnya belanja daerah masih banyak juga dipergunakan untuk kepentingan aparatur, artinya pemerintahan kabupaten serdang bedagai masih berpihak ke aparatur.

Terjadi SILPA yang meningkat dari tahun-ketahun, artinya belanja kabupatem Serdang Bedagai hanya sedikit. Jadi pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai belum memihak kepada rakyat

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja

PENDAHULUAN

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan dari institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode dimasa yang akan datang. Anggaran juga dipahami sebagai pernyataan yang berisi perincian penerimaan dan belanja operasional ,ataupun belanja modal, bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang.

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan

mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan

Pada prinsipnya anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu. Dalam Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006, APBD didefenisikan sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

1

Dalam prakteknya, anggaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyusunan dan alokasi anggaran sering mengabaikan prinsip keadilan social. Hal itu ditandai oleh alokasi anggaran bagi pejabat yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk kepentingan public. Disinilah letak urgensi mengapa advokasi anggaran perlu dilakukan, agar anggaran benar-benar ditempatkan sebagaimana fungsi yang seharusnya.

KAJIAN TEORI

Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya operasional perusahaan. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Munandar, 2005, pengertian anggaran yaitu: “Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.

Menurut Y.Supriyono, 2004, pengertian anggaran yaitu: ”Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana”.

Pendapatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings. Menurut Niswonger, 2004, pengertian pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Tujuan dan Manfaat Anggaran

Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum.

2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasi semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan dimasa yang akan datang.
3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.
4. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat di mengerti dan di dukung oleh semua bagian, untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan.

Usia Anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya.

Manfaat Anggaran yaitu :

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengertian perencanaan sebagai berikut:

"Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai basil yang diinginkan".

b. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan.

Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan.

c. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai

bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.

d. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

Keuntungan dan Keterbatasan Anggaran

Pemakaian anggaran di dalam perusahaan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran merupakan kekuatan manajemen dalam menyusun perencanaan, dimana manajemen melihat ke depan untuk menentukan tujuan perusahaan yang dinyatakan di dalam ukuran finansial.
2. Anggaran dapat digunakan alat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, misalnya koordinasi antara berbagai penjualan dengan kegiatan produksi.
3. Implementasi anggaran dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan perusahaan. Penyimpangan antara anggaran dengan realisasi dihitung dan dianalisa, dan manajemen dapat mengetahui adanya penyelewengan tersebut.
4. Berdasarkan teknik yang digunakan dalam anggaran, manajemen dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan apakah dapat berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

5. Pemakaian anggaran mengakibatkan timbulnya suasana yang bersemangat untuk memperoleh laba, timbul kesadaran tentang pentingnya biaya sebelum dana disediakan. Tekanan anggaran bukan semata-mata menekan biaya, akan tetapi adalah memaksimalkan laba dalam jangka panjang, dan tambahan biaya akan dibenarkan apabila tambahan biaya tersebut diperkirakan dapat meningkatkan laba.
6. Pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat pengukur prestasi suatu bagian atau individu di dalam organisasi perusahaan.
7. Pemakaian anggaran dapat membantu manajemen di dalam pengambilan keputusan untuk memilih beberapa alternatif yang mungkin dilaksanakan, misalnya: membuat atau membeli, membuat atau menyewa, menolak atau menerima pesanan, khusus, mendorong atau mengurangi produk tertentu dan sebagainya.

Keterbatasan Anggaran

Disamping keuntungan-keuntungan dari pemakaian anggaran perlu diketahui pula adanya keterbatasan dari anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi atas kegiatan yang akan datang, ketepatan dari estimasi sangat tergantung kepada pengalaman dan kemampuan dari estimator atau proyektor, ketidak tepatan anggaran berakibat tidak baik sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dengan baik.
2. Anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi. Anggaran disusun atas dasar kondisi dan asumsi yang mendasari penyusunan anggaran mengharuskan adanya revisi anggaran agar anggaran tersebut dapat digunakan sebagai alat manajemen. Perubahan kondisi atau asumsi misalnya dapat berupa: laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

3. Anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajer-manajer perusahaan, secara terus-menerus dan terkoordinasi berusaha dan bertanggung-jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan di dalam anggaran.
4. Semua pihak di dalam perusahaan perlu menyadari bahwa anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan "judgement" manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya.

Proses Anggaran

Dalam menyusun proses anggaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Advokasi Anggaran

Advokasi anggaran bertujuan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang menyangkut anggaran demi terwujudnya suatu kebijakan anggaran yang lebih baik. Melalui advokasi anggaran, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses penganggaran dapat diminimalisir. Ada banyak isu yang bisa menjadi focus dalam advokasi anggaran, diantaranya:

1. Kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran

Alokasi anggaran adalah sejumlah dana yang dianggarkan untuk membiayai program pada sector tertentu, misalnya alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan atau alokasi anggaran untuk program tenaga kerja. Alokasi anggaran patut menjadi isu karena selama ini dalam pendistribusiannya masih belum berdasarkan rasionalitas dan sesuai dengan kebutuhan. Alokasi anggaran memang patut untuk dijadikan salah satu isu advokasi karena dalam penetapannya tidak didasarkan oleh prinsip rasional dan keadilan.

2. Kebijakan struktur anggaran

Struktur anggaran merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan-pembiayaan. Dari tida komponen tersebut pembiayaan hanya ada jika terjadi defisit anggaran yang menyebabkan pemerintah harus meminjam dari pihak lain atau menjual surat obligasi ataupun asetnya. Struktur anggaran perlu diadvokasi untuk menghindari kekeliruan penempatan pos-pos anggaran, misalnya dulu hutang ditempatkan pada pendapatan/penerimaan, padahal itu merupakan pembiayaan yang harus dibayar.

3. Kebijakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan budgeter dan non budgeter

Sumber penerimaan budgeter adalah sumber penerimaan yang dicantumkan dalam APBD. Sedangkan sumber penerimaan non budgeter merupakan sumber penerimaan yang tidak dicantumkan dalam APBD. Persoalan yang cukup pelik disini adalah menyangkut pengelolaan dana non budgeter yang asanya dari nama tidak jelas dan penggunaan dan tanggungjawabannya tidak jelas juga, bahkan sering bebas dari pertanggungjawaban dan control. Dalam kasus ini, merupakan suatu tantangan untuk dapat menarik sebanyak mungkin dana-dana nonbudgeter ke dalam APBD.

4. Kebijakan tender proyek

Proyek-proyek yang telah direncanakan dan ditetapkan anggarannya dalam APBD untuk merealisasikannya kemudian dilaksanakannya tender proyek oleh pemerintahan. Permasalahan utama yang timbul dalam kegiatan ini adalah masih banyak terjadi permainan, KKN dan prosesnya belum transparan.

5. Dan kebijakan control dan akuntabilitas anggaran

Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara, tanggal 30 Agustus 1970, sebagaimana yang dikutip oleh Rifai dan Pracoyo dalam bukunya Urgensi Transparansi Anggaran, control didefinisikan sebagai “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturaqn-

aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi yang dimaksud dengan control anggaran adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan akuntabilitas anggaran adalah kewajiban legislative dan eksekutif untuk bertanggung jawab atas segala keputusan dan pelaksanaan anggaran.

Pengertian Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

- *Anggaran pendapatan*, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
 - *Anggaran belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

- *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha. Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan.

Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum adalah komponen terbesar dalam Dana Perimbangan. Peningkatan Dana Perimbangan merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang disertai pendanaannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meningkatnya alokasi dana perimbangan juga dipicu oleh penggabungan instansi vertikal menjadi organisasi perangkat daerah beserta pegawainya, yang disusul dengan peningkatan gaji dan tunjangan dalam waktu bersamaan.

Komponen Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- B. Dana Perimbangan, dan Dana perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan; Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum.
- C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, SAP mengatur penyajian belanja pada lembar muka Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja, sedangkan Kepmendagri 29/2002 mengklasifikasikan belanja ke dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Selanjutnya baik pada Belanja Aparatur maupun Belanja Publik, belanja diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

Hal ini dilaksanakan dengan cara menyusun data, dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan sehingga diperbolehkan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi dari gambaran

2. Analisis Komperatif

Suatu metode yang dipergunakan dengan cara memperbandingkan hasil penelitian yang diperoleh diantara dua system kerja masalah yang diteliti sehingga diperoleh kompensasi hasilnya.

HASIL PENELITIAN

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dimana penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan Belanja Daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kondisi perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2004-2005 belum berkembang dengan memuaskan karena pergerakan perekonomian andalah harga tertumpu pada sektor pertanian 47,45 %. Sedangkan dari sektor industri hanya 2 0,12 %. Dengan memperkirakan sumbangan sektor pertanian tidak menurun, pertumbuhan sektor diharapkan meningkat maka diperkirakan pendapatan dari sektor pajak daerah dinilai dapat meningkat sebesar peningkatan PDRB. Dengan demikian perkembangan sumber pendapatan dari sektor pajak daerah diproyeksikan akan meningkat rata-rata 20,6 pertahun. Sumbangan dari perimbangan diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana diharapkan perekonomian negara akan semakin baik, penerapan otonomi daerah yang lebih luas sehingga penyaluran dari perimbangan ke daerah akan lebih besar terutama diharapkan dari dana DAK. Prediksi untuk pendapatan 5 tahun kedepan direncanakan melalui kebijakan peningkatan Pendapatan dengan melakukan intersifikasi dan ekstensifikasi PAD, disamping itu melakukan terobosan peningkatan dana perimbangan, DAU, DAK, pinjaman Daerah dan kemanfaatan lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan bidang tertentu yang akan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar minimal sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Arah kebijakan belanja daerah dilakukan dengan menganalisa, arah kebijakan sesuai program prioritas Kepala Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah melalui Visi, Misi Kabupaten Serdang Bedagai serta melakukan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Belanja menurut kelompok terdiri dari :

- Belanja Langsung
- Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- Belanja pegawai
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
- Bantuan Sosial
- Belanja Bagi hasil
- Bantuan keuangan
- Belanja tidak langsung

Sedangkan belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- Belanja pegawai

- Belanja daerah dan jasa
- Belanja modal

Dengan memperhatikan perkembangan belanja terakhir bahwa belanja pegawai naik yakni dari 37.457.227 169 M. pada tahun 2004 menjadi 165.097.422.356 M pada tahun 2005. Dengan memperhatikan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan seperti gaji pegawai, biaya barang dan jasa untuk operasional penyelenggara pemerintahan maka besarnya belanja dari kelompok belanja tidak langsung untuk 5 tahun kedepan diproyeksikan sebesar Rp. 230.672.019.075 M pada tahun 2007 meningkat menjadi 639.260.476.761 pada tahun 2010. Untuk belanja langsung diproyeksikan akan naik sebesar 263.290.431.093 M pada tahun 2007 dan diperkirakan akan mencapai 729.655.756.177 M pada tahun 2010 dengan perbandingan rata-rata antara belanja langsung 53,30 % dan belanja tidak langsung 46,70 %.

Pengelolaan pendapatan daerah akan menekankan pada keserasian antara kebutuhan biaya dan pendapatan prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber daya lokal melalui peningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya, dengan konsekuensi adanya efisiensi biaya/belanja daerah. Perencanaan belanja Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2010. Karena keterbatasan anggaran, maka belanja daerah akan dioptimalkan pada prioritas program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi maupun efektifitas sesuai dengan prioritas untuk memberikan dukungan pada strategi pembangunan daerah. Peningkatan peranan sektor pajak daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD menimbulkan sekuensi kebutuhan kebijakan ekstensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak tanpa menimbulkan distorsi bagi perkembangan ekonomi lokal perlu dikembangkan. Demikian juga dengan program intensifikasi perlu dilakukan melalui upaya

terus menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Sasaran Makro Ekonomi Serdang Bedagai pada tahun 2006, diperkirakan akan semakin membaik, hal ini ditandai suksesnya pelaksanaan Pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan Presiden serta wakilnya secara langsung. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 6,06 persen dan perkiraan pada tahun 2006 mencapai 6,43 persen, PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp. 5,059 triliun, dan angka ini diperkirakan semakin meningkat pada tahun 2006 mencapai Rp. 5,569 triliun dan diharapkan pada tahun 2010 angka ini mencapai Rp. 8,059 triliun, demikian halnya PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku untuk tahun yang sama berturut sebesar Rp. 8,6 juta tahun 2005 dan 2006 Rp. 9,41 juta dan Rp. 11,53 juta tahun 2010. Di sisi lain, Struktur ekonomi masih tetap didominasi oleh sektor pertanian sebesar 58,50 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 19,24 persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Pariwisata sebesar 15,12 persen dan sektor jasa 32,62 kondisi tersebut mendorong perbaikan pada seluruh sektor dan diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga untuk tahun 2006 diperkirakan mencapai 55,05 persen, 19,24 persen dan lain-lain 32,12 persen dan 21,70 dimana diharapkan dari sektor pertanian yang masih dominan ditunjang dari sektor industri. Pembiayaan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi selama lima tahun (2006-2010) dibutuhkan investasi sebesar Rp. 1,83 triliun, sumber dana pembiayaan ini diharapkan melalui kontribusi Pemerintah, swasta dan Masyarakat, pada tahun 2006 sebesar Rp. 5,569 triliun, tahun 2007 sebesar Rp. 6,259 triliun, tahun 2008 sebesar Rp. 6,854 triliun, tahun 2009 sebesar Rp. 7,459 triliun, tahun 2010 sebesar Rp. 8,059 triliun.

Berdasarkan data indikator makro ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005 total PDRB sebagai landasan perhitungan investasi berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp. 3,380 Triliun, dengan perkiraan akumulasi investasi bersumber dari dana

swasta/masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka pembentukan investasi tersebut sumbangan dari sektor swasta adalah sebesar 85 % dan sumbangan dari sektor pemerintahan sebesar 15 %. Alokasi investasi tersebut bersumber dari :

- Tambahan masyarakat 85 %
- APBN
- APBD Propinsi
- APBD Kabupaten

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005 adalah 6,06 % walaupun dengan alokasi anggaran tersebut relatif kecil namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai telah mampu memenuhi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional.

Total pendapatan pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2007 sebesar Rp.485.125.737.484 terjadi pengurangan pada APBD realisasi Rp.476.435.804.661,-. Berkurangnya realisasi pendapatan tahun 2007 dikarenakan berkurangnya pajak daerah dari anggaran murni. Jadi total pendapatan APBD 2007 dengan realisasi 2007 tidak sesuai dengan anggaran semulanya, terjadi penambahan anggaran, begitu juga dengan struktur pendapatan, terjadi penambahan pada realisasinya. Total pendapatan APBD realisasi 2007 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.10.275.009.987,- (2%), Dana Perimbangan sebesar Rp.426.812.349.610,- (90%), dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.39.348.445.064,- (8%). Artinya dari keseluruhan total pendapatan ternyata Kabupaten Serdang Bedagai masih ketergantungan dengan pemerintah pusat, dikarenakan tingginya Dana Perimbangan dibandingkan dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbandingan antara belanja pada APBD murni 2007 dan APBD realisasi 2007 mengalami pengurangan, pengurangan tersebut dikarenakan kurangnya belanja langsung, artinya lebih besar belanja untuk aparatur dibandingkan belanja buat rakyat. Total belanja

daerah pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2007 sebesar Rp.461.113.328.353,-, dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.220.791.056.168,- (48%), dan sisanya untuk Belanja Langsung sebesar Rp.240.322.272.185,- (52%). Dari besarnya total belanja tersebut maka lebih besar belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Ini membuktikan belanja tersebut sudah memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tetapi kalau kita lihat dari belanja pegawai yang ada di belanja tidak langsung cenderung terlalu tinggi, artinya belum tentu belanja tersebut seluruhnya buat rakyat, masih ada juga dinikmati buat aparatur.

Total pendapatan pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2008 sebesar Rp.530.106.820.914,-. Jika dilihat antara anggaran yang murni dengan anggaran realisasi mengalami perubahan atau penambahan anggaran. Kenaikan anggaran tersebut dikarenakan naiknya pendapatan lain-lain yang sah. Total pendapatan APBD 2008 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.22.499.000.000,- (4%), Dana Perimbangan sebesar Rp.476.810.747.889,- (90%), dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.30.797.073.025,- (6%). Artinya dari keseluruhan total pendapatan ternyata Kabupaten Serdang Bedagai juga masih ketergantungan dengan pemerintah pusat, dikarenakan tingginya Dana Perimbangan dibandingkan dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama seperti di tahun 2007.

Perbandingan antara belanja pada APBD murni tahun 2008 dengan APBD realisasi 2008 mengalami penurunan, penurunan tersebut dikarenakan turunnya belanja langsung sama halnya seperti belanja di tahun 2008 artinya lebih mementingkan kepentingan aparatur dibandingkan kepentingan publik. Total belanja daerah pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2008 sebesar Rp.551.675.235.023,-, dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.283.226.651.497,- (51%), dan sisanya untuk Belanja Langsung sebesar Rp.268.448.583.526,- (49%). Dari besarnya total belanja tersebut maka lebih besar belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Artinya pemerintahan Kabupaten Serdang

Bedagai belum memenuhi kepentingan masyarakat disana, lebih memenuhi kepentingan aparatur saja.

Total pendapatan pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2009 sebesar Rp.596.875.492.248,- juga terjadi perubahan anggaran pada anggaran murni dan anggaran realisasinya yaitu terjadi penambahan pada pendapatan, penambahan tersebut dikarenakan naiknya pendapatan lain-lain yang sah. Total pendapatan APBD 2009 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.25.439.240.000,- (4%), Dana Perimbangan sebesar Rp.517.832.531.019,- (87%), dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.53.603.721.229,- (9%). Artinya dari keseluruhan total pendapatan ternyata Kabupaten Serdang Bedagai juga masih ketergantungan dengan pemerintah pusat, dikarenakan tingginya Dana Perimbangan dibandingkan dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama seperti di tahun 2007 dan 2008 (belum bisa mandiri).

Perbandingan antara anggaran belanja pada APBD murni 2009 dengan anggaran belanja pada perubahan APBD 2009 mengalami kenaikan, kenaikan tersebut dikarenakan naiknya belanja langsung, artinya ditahun 2009 ini lebih baik anggaran belanjanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan aparatur. Total belanja daerah pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2009 sebesar Rp.621.635.922.623,-. dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.330.103.832.134,- (53%), dan sisanya untuk Belanja Langsung sebesar Rp.291.532.090.489,- (47%). Dari besarnya total belanja tersebut maka lebih besar belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Artinya pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai belum memenuhi kepentingan masyarakat disana, lebih memenuhi kepentingan aparatur saja.

Trend total pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2007 – 2009 mengalami kenaikan dari tahun – ketahun. Total pendapatan daerah di tahun

2007 sebesar Rp.476.435.804.661,- di tahun 2008 sebesar Rp. 530.106.820.914,- dan di tahun 2008 sebesar Rp.596.875.492.248,-. Kenaikkan pendapatan daerah yang lebih menonjol dikarenakan naiknya dana perimbangan, artinya dari tahun ketahun pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai ini terus ketergantungan dari pemerintahan pusat.

Terjadi kenaikan pendapatan di tahun 2008 dan 2009, namun di tahun 2007 APBD mengalami surplus sementara di tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami defisit. Hal ini perlu dipertanyakan kenapa terjadi surplus di tahun 2007.

Dana Perimbangan secara persentase terus mengalami penurunan, namun secara besaran angka rupiah terus mengalami kenaikan dan mendominasi jumlah pendapatan diatas 85%. Dalam arti bahwa Kabupaten Serdang Bedagai masih ketergantungan dengan pusat (belum mandiri).

Pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga terjadi fluktuasi di dalam besaran nominalnya. Di tahun 2008 mengalami penurunan dan pada tahun 2009 kembali naik. Yang menjadi poin penting didalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang terus naik, terutama di tahun 2009. hal ini perlu diteliti lebih lanjut pada belanja APBD sejauhmana efektivitas dari belanja yang berkaitan dengan otonomi khusus tersebut.

Untuk struktur pendapatan dari dana perimbangan secara persentase Dana Alokasi Umum (DAU) terus mengalami penurunan, sebaliknya Dana Alokasi Khusus (DAK) terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dengan kata lain bahwa Kabupaten Serdang Bedagai sudah mementingkan kepentingan masyarakat luas.

Trend Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2007 – 2009 juga mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Total belanja daerah tahun 2007 sebesar Rp.461.113.328.353,- belanja tahun 2008 sebesar Rp.551.675.235.023,- dan ditahun 2009 total belanjanya sebesar Rp.621.635.922.623,-. Kenaikan tersebut dikarenakan naiknya

belanja tidak langsung yang lebih cenderung. Naiknya belanja tidak langsung dikarenakan naiknya belanja pegawai, artinya apakah di setiap tahun ada penambahan pegawai di Kabupaten Serdang Bedagai.

Total Sisa lebih perhitungan anggaran di tahun 2009 sebesar Rp.56.000.000.000,- sedangkan di tahun 2008 total sisa lebih perhitungan anggarannya sebesar Rp.36.169.486.909. jadi kalau kita lihat perbandingan antara 2008 – 2009 maka silpnya mengalami kenaikan. Dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang ada, ini menutupi pembayaran utang dan penyertaan modal pemerintah. Tetapi dengan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran, bukan berarti bisa dikatakan baik. Artinya pemerintah membuat belanja langsungnya tidak terlaksana untuk masyarakat / pemerintah menjalankan pembangunan dengan lambat.

Total Sisa lebih perhitungan anggaran di tahun 2007 sebesar Rp.26.557.192.400,- di tahun 2008 besar Sisa lebih perhitungan anggarannya Rp.36.169.486.909,- sedangkan di tahun 2009 besar Sisa lebih perhitungan anggaran Rp.56.000.000.000,-.Trend Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun 2007-2009 mengalami kenaikan. Kenaikan Sisa lebih perhitungan anggaran tersebut dikarenakan turunnya belanja langsung yang disebabkan turunnya belanja modal dari tahun-ketahun. Ini membuktikan bahwa pemerintah membuat belanja langsungnya tidak terlaksana, dengan kata lain pembangunan daerah berjalan dengan lambat/anggaran tidak terserap untuk kebutuhan masyarakat. Dan naiknya Sisa lebih perhitungan anggaran selama 3 tahun, ini menutupi defisit dan membayar utang & dana cadangan.

A. KESIMPULAN

1. Terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun – ketahun (tahun 2007 – 2009).

Tetapi pendapatan tersebut lebih banyak diperoleh dari dana perimbangan artinya

pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai masih ketergantungan pada pemerintahan pusat.

2. Terjadi peningkatan belanja daerah dari tahun – ketahun (tahun 2007 – 2009). Tetapi besarnya belanja daerah masih banyak juga dipergunakan untuk kepentingan aparatur, artinya pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai masih berpihak ke aparatur.
3. Terjadi SILPA yang meningkat dari tahun – ketahun, artinya belanja kabupaten Serdang Bedagai hanya sedikit. Jadi pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai belum memihak kepada rakyat.
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai alat pengawasan berupa income, out put, outcome. Dimana income adalah jumlah anggaran, output adalah kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan outcome adalah hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2007

APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2008

APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009

Bake, Jamal dkk, 2001, *Negara Bobrok dan Hak Rakyat Terhadap Anggaran Negara. Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) – Jakarta*

FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), *Buku Anggaran – Jakarta*

Ihyaul Ulum. *Akuntansi Sektor Publik*, UMM PRESS, Yogyakarta, 2004

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002

Mulawarman, Aji Dedi *Akuntansi Syariah*, Jakarta tahun 2005

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) – *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta*

RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2006 – 2010

Salemba Empat. 2007. Dedi Nordiawan. *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta

Salemba Empat. 2008, Robert Libby. *Akuntansi Keuangan*, Jakarta

Salemba Empat. 2007, UPP STIM YKNP. *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta

Website Kabupaten Serdang Bedagai. www.serdangbedagai.go.id tanggal 20 Mei 2010

Website Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. www.bpk.go.id tanggal 20 Mei 2010

Wibowo, 2007. *Akuntansi Keuangan Dasar*, Jakarta